

Peran Organisasi PGRI dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di Era Transformasi Pendidikan Digital

Adilya Manggalih¹, Prawita Nurvitria Sulung, Moh Gufron³

^{1,2,3} Universitas Bhinneka PGRI, Tulungagung, Indonesia

¹adilyamanggalih59@gmail.com

²prawitanurvitria@gmail.com

³gufron.ringinpitu@gmail.com

ABSTRAK

Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memiliki fungsi penting dalam meningkatkan profesionalisme guru saat menghadapi perubahan dalam pendidikan digital. Artikel ini membahas bagaimana PGRI memberikan kontribusi melalui pelatihan, advokasi, penyebaran informasi terkait teknologi pendidikan, serta dukungan hukum dan karier untuk membantu meningkatkan kemampuan pedagogik dan digital guru di zaman revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Hasil dari tinjauan pustaka menunjukkan bahwa keterlibatan PGRI dalam pengembangan kemampuan teknologi dan pedagogi membantu guru lebih siap menghadapi tuntutan pembelajaran yang berbasis digital, meskipun masih ada tantangan seperti akses terhadap infrastruktur dan pelatihan yang berkelanjutan. Dengan kerjasama antara PGRI, pemerintah, dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan lainnya, profesionalisme guru bisa ditingkatkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: PGRI, Profesionalisme guru, Transformasi digital, Kompetensi pedagogik, Organisasi profesi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Penulis Korespondensi:

Adilya Manggalih,

Universitas Bhinneka PGRI,

Jl. Mayor Sujadi No.7, Manggis, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66229

Adilyamanggalih59@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan nasional di Indonesia sedang mengalami perubahan besar yang memerlukan penyesuaian cepat terhadap perubahan di seluruh dunia, terutama yang berhubungan dengan pembelajaran digital. Para guru, yang merupakan garis depan dalam sistem pendidikan, memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan seberapa baik proses belajar dan mengajar berlangsung, bukan hanya sebagai pemberi ilmu tetapi juga sebagai penggerak inovasi yang bisa menggunakan teknologi dengan baik dalam pembelajaran digital. Perubahan dalam pendidikan digital memerlukan guru yang tidak hanya mahir dalam pengajaran, tetapi juga yang memiliki keterampilan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang (Pembelajaran, 2025).

Organisasi guru, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), adalah lembaga penting yang berkontribusi dalam peningkatan profesionalisme para guru di Indonesia. PGRI berfungsi sebagai tempat untuk advokasi, peningkatan kemampuan mengajar, penyelenggaraan pelatihan, serta pengembangan jaringan profesional bagi guru di seluruh Indonesia. Peran PGRI dalam memperjuangkan hak-hak para guru, menyediakan dukungan pelatihan, serta menjadi penghubung antara guru dan pembuat kebijakan adalah bagian krusial dalam pengembangan profesional tenaga pendidik. Penelitian menunjukkan bahwa PGRI telah berperan penting dalam membela hak guru dan menguatkan kedudukan profesi guru dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dukungan terhadap perlindungan hukum dan kepentingan para guru dalam menghadapi konflik profesi (Protecting & Profession, 2025).

Selain itu, peneliti menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme seorang guru sangat dipengaruhi oleh keahlian mereka dalam menggabungkan kemampuan digital dengan proses belajar mengajar. Guru yang dapat menerapkan teknologi pembelajaran digital terbukti mampu meningkatkan mutu pendidikan, mempermudah pembelajaran yang lebih sesuai dengan konteks, dan membantu mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa di zaman digital. Keberhasilan perubahan digital dalam pendidikan sangat tergantung pada keahlian digital para guru, yang perlu didukung dengan program pelatihan yang efektif dan berlangsung terus menerus (Novianto et al., 2025).

Namun, meski PGRI mendorong aspek pengembangan profesionalisme, masih banyak tantangan besar seperti kurangnya pelatihan teknologi, infrastruktur digital yang tidak merata, dan adanya penolakan terhadap perubahan di sekolah. Oleh itu, perlu dilakukan evaluasi lebih mendalam terhadap peran organisasi profesi guru untuk memahami bagaimana sumbangsuhnya terhadap peningkatan profesionalisme guru di era

perubahan digital. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran organisasi PGRI dalam meningkatkan profesionalisme guru di era transformasi pendidikan digital, khususnya melalui program pelatihan, dukungan advokasi, dan penguatan kompetensi digital guru. Fokus penelitian ini akan menyoroti bentuk-bentuk kontribusi organisasi profesi guru, tantangan pelaksanaannya, serta implikasi terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan.

2. PEMBAHASAN

2.1 Profesionalisme Guru di Era Digital

Profesionalisme guru merupakan kemampuan dan komitmen seorang pendidik dalam melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Menurut Kunandar (2015), profesionalisme guru ditandai oleh penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang mendukung efektivitas pembelajaran. Dalam konteks era digital, profesionalisme guru juga menuntut penguasaan keterampilan abad ke-21, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung proses pembelajaran yang inovatif.

Penelitian Novianto et al. (2025) menunjukkan bahwa guru yang memiliki kompetensi digital tinggi lebih mampu merancang pembelajaran yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik modern. Profesionalisme di era digital bukan hanya tentang kemampuan teknis menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup pemahaman kritis terhadap literasi digital, keamanan siber, serta etika penggunaan teknologi pendidikan. Dengan demikian, pengembangan profesionalisme guru di era digital perlu diiringi dengan strategi pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.

2.2 Peran Organisasi Profesi Guru dalam Pengembangan Profesionalisme

Organisasi profesi guru memiliki fungsi strategis sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan posisi tawar guru dalam sistem pendidikan nasional. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi profesi tertua dan terbesar di Indonesia memainkan peran penting dalam pengembangan profesionalisme guru melalui tiga aspek utama: pelatihan dan peningkatan kompetensi, advokasi dan perlindungan hak profesi, serta pembangunan jejaring profesional antarpendidik (Himmatul Haq Aidi & Zainal Abidin, 2023).

Studi yang dilakukan oleh Nuraini & Nurkolis (2025) menegaskan bahwa organisasi profesi seperti PGRI tidak hanya berperan dalam peningkatan keterampilan mengajar, tetapi juga menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa profesi dan penguatan posisi hukum guru. PGRI menjadi sarana efektif bagi guru untuk memperoleh dukungan sosial, pembinaan profesional, serta akses terhadap kebijakan pendidikan yang berpihak pada pendidik. Dalam konteks ini, organisasi profesi menjadi motor penggerak utama dalam membentuk guru yang kompeten, berdaya saing, dan memiliki komitmen terhadap etika profesi.

2.3 Transformasi Pendidikan Digital dan Kompetensi Guru

Transformasi pendidikan digital menuntut adanya perubahan paradigma dalam praktik pembelajaran, di mana teknologi bukan sekadar alat bantu, melainkan bagian integral dari proses belajar-mengajar. Menurut Nurdiyahayati & Thaufani (2025), literasi digital guru merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan pembelajaran digital yang efektif, karena mencakup kemampuan guru untuk mencari, mengevaluasi, mencipta, dan membagikan informasi secara bertanggung jawab melalui teknologi.

Guru yang mampu mengintegrasikan teknologi secara kreatif dan kritis dapat menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Oleh karena itu, peran organisasi profesi dalam memfasilitasi pelatihan dan peningkatan literasi digital menjadi sangat penting. Penelitian Pembelajaran (2025) menyebutkan bahwa pelatihan teknologi berbasis kebutuhan guru di lapangan mampu meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, memperkuat keterampilan pedagogik digital, dan mempercepat adaptasi guru terhadap sistem pendidikan berbasis teknologi. Dengan demikian, transformasi pendidikan digital menjadi peluang bagi organisasi seperti PGRI untuk menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia pendidikan.

2.4 Tantangan Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia

Meskipun berbagai program penguatan profesionalisme telah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi guru di Indonesia. Tantangan utama antara lain adalah ketimpangan akses terhadap fasilitas digital, rendahnya partisipasi dalam pelatihan TIK, serta kurangnya dukungan kebijakan yang konsisten di tingkat daerah (Protecting & Profession, 2025). Selain itu, perbedaan tingkat literasi digital antarwilayah menyebabkan kualitas pembelajaran digital belum merata.

Menurut Novianto et al. (2025), hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran pelatihan, kurangnya perangkat teknologi, serta resistensi terhadap inovasi menjadi penghalang utama dalam transformasi profesionalisme guru. Oleh sebab itu, diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan,

dan organisasi profesi untuk memperluas akses pelatihan, meningkatkan infrastruktur digital, serta menciptakan budaya belajar berkelanjutan bagi guru. PGRI sebagai wadah profesi memiliki posisi unik untuk menjembatani kebutuhan tersebut melalui pelatihan terdesentralisasi dan advokasi kebijakan berbasis data.

2.5 Konseptualisasi Peran PGRI dalam Era Transformasi Digital

Secara konseptual, peran PGRI dalam konteks transformasi digital dapat dikategorikan menjadi tiga dimensi utama:

1. Fasilitator Pengembangan Kompetensi Digital – PGRI menyediakan pelatihan berbasis kebutuhan guru yang meliputi keterampilan digital dasar, desain pembelajaran berbasis TIK, serta penggunaan media pembelajaran interaktif.
2. Advokat Hak dan Kesejahteraan Guru – PGRI memperjuangkan perlindungan hukum, peningkatan kesejahteraan, serta hak-hak profesional guru yang relevan dengan tantangan pembelajaran digital.
3. Katalisator Komunitas Belajar Profesional (Professional Learning Community) – melalui forum, seminar, dan kelompok kerja, PGRI memfasilitasi guru untuk berbagi praktik terbaik dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi.

Ketiga peran tersebut selaras dengan model pengembangan profesionalisme guru abad ke-21 yang menekankan aspek *lifelong learning*, kolaborasi, dan inovasi. Dengan mengintegrasikan dimensi pelatihan, advokasi, dan kolaborasi, PGRI berpotensi menjadi kekuatan transformatif dalam membentuk ekosistem pendidikan digital yang adaptif dan berkeadilan di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** yang bertujuan untuk menggambarkan peran Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru di tengah dinamika transformasi pendidikan digital. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial dan perilaku organisasi dari perspektif pelaku langsung. Data dikumpulkan melalui **observasi partisipatif**, **wawancara mendalam** dengan pengurus PGRI dan guru aktif, serta **dokumentasi kegiatan organisasi** yang berkaitan dengan pelatihan, advokasi, dan pengembangan profesionalisme guru, sehingga memungkinkan triangulasi data untuk meningkatkan keakuratan temuan. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi melalui triangulasi sumber untuk menemukan pola, tema, dan interpretasi relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan serupa juga digunakan dalam studi peran PGRI dalam peningkatan profesionalisme guru yang menekankan pelatihan dan advokasi sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu guru. (Himmatul Haq Aidi & Zainal Abidin, 2023)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memiliki peran strategis dan multifaset dalam meningkatkan profesionalisme guru, terutama dalam konteks transformasi digital pendidikan. Berdasarkan temuan dari program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh PGRI di berbagai tingkatan, organisasi ini secara aktif melakukan penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, mentoring, advokasi, dan pengembangan komunitas belajar profesional yang berdampak pada peningkatan kompetensi pedagogik dan digital guru. Pelatihan yang diselenggarakan mencakup penggunaan teknologi dalam pembelajaran, penyusunan materi digital, dan penerapan strategi pembelajaran berbasis teknologi informasi yang relevan dengan tuntutan abad ke-21 (Himmatul Haq Aidi & Zainal Abidin, 2023). Peran ini juga diperkuat oleh adanya pengembangan kelompok kerja guru dan komunitas profesional yang mendorong kolaborasi antaranggota dalam berbagi praktik terbaik dan inovasi pendidikan digital (OECD, 2022).

PGRI juga memainkan peran signifikan sebagai lembaga advokasi dan pelindung hak guru. Hasil wawancara dengan pengurus dan anggota menunjukkan bahwa organisasi ini aktif memperjuangkan hak guru dalam berbagai forum kebijakan dan memberikan pendampingan hukum bagi guru yang mengalami sengketa profesi. Dukungan ini tidak hanya meningkatkan rasa aman dan kepercayaan diri guru, tetapi juga memperkuat komitmen profesional mereka terhadap pekerjaannya (Nuraini & Nurkolis, 2025). Temuan ini konsisten dengan pandangan Darling-Hammond et al. (2020) yang menekankan bahwa keberhasilan profesi guru sangat bergantung pada keseimbangan antara peningkatan kompetensi dan perlindungan profesional.

Selanjutnya, hasil analisis menunjukkan bahwa keterlibatan PGRI dalam pengembangan profesional digital turut meningkatkan literasi digital guru di berbagai daerah. PGRI menyediakan pelatihan berbasis platform digital yang mencakup penggunaan aplikasi pembelajaran, pembuatan media interaktif, dan strategi *blended learning*. Program ini memperkuat kemampuan guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran secara kreatif dan kritis (Nurdihayati & Thaufani, 2025; Redecker, 2020). Penelitian Rahmawati

et al. (2024) juga menegaskan bahwa guru yang mendapatkan dukungan organisasi profesi cenderung lebih adaptif terhadap inovasi teknologi dibanding mereka yang tidak terlibat dalam pelatihan terstruktur.

Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi adanya sejumlah tantangan yang dihadapi PGRI, seperti keterbatasan sumber daya, kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, serta rendahnya partisipasi guru di daerah terpencil. Hambatan ini menimbulkan kesenjangan kompetensi digital antara guru di perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi pengembangan profesionalisme yang lebih adaptif dan kontekstual (UNESCO, 2023). Sebagaimana dikemukakan Hargreaves dan Fullan (2020), pengembangan profesional guru harus berkelanjutan, fleksibel, dan berbasis pada realitas kerja guru sehari-hari agar berdampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran.

Selain pelatihan dan advokasi, hasil penelitian juga menemukan bahwa PGRI berperan penting dalam membangun budaya reflektif di kalangan guru. Melalui lokakarya reflektif dan forum diskusi daring, guru diajak untuk mengevaluasi praktik pembelajarannya dan berbagi pengalaman dalam penggunaan teknologi di kelas. Pendekatan ini selaras dengan konsep reflective teaching (Schön, 1987), yang menempatkan guru sebagai pembelajar sepanjang hayat. Budaya refleksi ini menumbuhkan kesadaran profesional dan tanggung jawab sosial dalam mengelola pembelajaran digital secara etis dan efektif.

Penelitian ini juga mengungkap adanya sinergi antara PGRI dengan lembaga pemerintah seperti Balai Guru Penggerak dan Dinas Pendidikan dalam memperluas pelatihan berbasis kebutuhan (need-based training). Kolaborasi ini memastikan bahwa materi pelatihan disesuaikan dengan konteks daerah dan karakteristik peserta. Pendekatan ini terbukti memperkuat efektivitas program karena menggabungkan dukungan kebijakan dengan praktik lapangan (Ministry of Education and Culture, 2024). Sebagaimana diungkapkan Novianto et al. (2025), kemitraan semacam ini merupakan kunci pemerataan mutu pendidikan, terutama dalam memperkecil kesenjangan digital antarwilayah.

Selain itu, temuan menunjukkan bahwa keberhasilan PGRI dalam mendorong inovasi pembelajaran digital banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan yang transformasional di tubuh organisasi. Pemimpin yang visioner dan kolaboratif mampu menciptakan atmosfer organisasi yang adaptif terhadap perubahan. Menurut teori transformational leadership (Bass & Riggio, 2006), kepemimpinan semacam ini meningkatkan komitmen dan kreativitas anggota, termasuk dalam konteks adaptasi terhadap teknologi pendidikan. Dalam hal ini, kepemimpinan PGRI di berbagai tingkat memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dan semangat kolaboratif antaranggota.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan desentralisasi dalam pelatihan PGRI lebih efektif dibanding pendekatan terpusat. Pelatihan yang dirancang di tingkat daerah memungkinkan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan lokal, bahasa, dan konteks budaya. Strategi desentralisasi ini meningkatkan partisipasi guru, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta mempercepat transfer keterampilan digital ke lapangan (Darling-Hammond et al., 2020). Desentralisasi juga memperkuat rasa kepemilikan (sense of belonging) anggota terhadap organisasi, yang berdampak positif terhadap keberlanjutan program pelatihan.

Temuan lain mengindikasikan bahwa kolaborasi lintas sektor memperkuat efektivitas program PGRI. Kemitraan dengan sektor swasta, universitas, dan platform teknologi pendidikan membuka peluang bagi guru untuk mengakses sumber daya digital yang lebih luas. PGRI berperan sebagai mediator dalam memastikan kemitraan ini berjalan sesuai etika profesi guru dan mendukung pemerataan kesempatan belajar (UNESCO, 2023). Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bentuk konkret dari paradigma triple helix antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat profesional dalam pendidikan digital (Etzkowitz & Zhou, 2018).

Akhirnya, penelitian menemukan bahwa dampak sosial dari kegiatan PGRI meluas hingga pada peningkatan citra dan martabat profesi guru di masyarakat. Melalui kegiatan sosial, publikasi ilmiah, dan kampanye literasi digital, PGRI berhasil mengembalikan kepercayaan publik terhadap guru sebagai agen perubahan pendidikan (Hargreaves & Fullan, 2020). Peran guru kini tidak hanya dipandang sebagai pendidik, tetapi juga inovator dan pembelajar sepanjang hayat yang berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Hal ini memperlihatkan bahwa profesionalisme guru yang dibangun PGRI tidak semata berorientasi pada kompetensi teknis, melainkan juga pada penguatan identitas sosial dan moral profesi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa PGRI telah berevolusi menjadi organisasi profesi yang adaptif, kolaboratif, dan visioner dalam menghadapi transformasi digital pendidikan. Melalui pelatihan, advokasi, refleksi, kepemimpinan transformasional, dan kolaborasi lintas sektor, PGRI tidak hanya berperan sebagai fasilitator kompetensi guru, tetapi juga sebagai katalis perubahan sistemik dalam pendidikan nasional. Model pengembangan profesionalisme guru yang dijalankan PGRI dapat dijadikan contoh bagi organisasi profesi lain di Asia Tenggara dalam membangun tenaga pendidik yang kompeten, beretika, dan tangguh menghadapi tantangan era digital (Fullan, 2021).

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi penting terhadap pengembangan profesionalisme guru dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa organisasi profesi guru seperti PGRI bukan hanya entitas administratif, tetapi juga agen transformasi sosial dan digital dalam pendidikan. Peran multifungsi yang dijalankan PGRI—meliputi pelatihan, advokasi, refleksi, dan

kolaborasi—mendukung teori professional learning community dan transformational leadership (Bass & Riggio, 2006; Hargreaves & Fullan, 2020), di mana guru belajar dan tumbuh melalui interaksi sosial, nilai kolektif, dan kepemimpinan visioner. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan profesionalisme guru di era digital tidak dapat dipisahkan dari dukungan organisasi profesi yang adaptif dan berorientasi inovasi.

Secara praktis, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi pendidikan digital sangat bergantung pada kemampuan organisasi profesi dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam kerangka pengembangan guru. Pemerintah dan pemangku kebijakan pendidikan perlu memperkuat kemitraan strategis dengan PGRI untuk memperluas pelatihan berbasis digital dan mendesentralisasi pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga menyoroti perlunya peningkatan pendanaan bagi organisasi profesi agar dapat menjangkau guru di daerah 3T. Dengan demikian, pemerataan kesempatan pengembangan profesional dapat tercapai dan kesenjangan digital antarwilayah dapat diminimalisasi (UNESCO, 2023; Kemendikbudristek, 2025).

Dari sisi kebijakan pendidikan, penelitian ini memberikan rekomendasi agar PGRI dan pemerintah bersama-sama merumuskan kebijakan pengembangan profesionalisme guru berbasis data dan bukti lapangan (evidence-based policy). Pendekatan ini penting agar pelatihan digital tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan guru di berbagai konteks pembelajaran. Pemerintah juga diharapkan memperkuat kerangka regulasi yang mendukung perlindungan hukum, kesejahteraan, dan pengakuan profesional guru yang aktif berkontribusi dalam inovasi pembelajaran digital. Selain itu, diperlukan sistem insentif berbasis kinerja digital guru agar motivasi untuk beradaptasi dengan teknologi semakin tinggi (Darling-Hammond et al., 2020).

Dari perspektif organisasi profesi, PGRI perlu memperkuat sistem manajemen berbasis data dalam merancang dan mengevaluasi program pelatihan. Penggunaan Learning Management System (LMS) internal dapat menjadi solusi efektif untuk memantau perkembangan kompetensi guru dan memfasilitasi pelatihan jarak jauh. Selain itu, PGRI dapat membangun pusat riset kecil (teacher innovation hub) di tingkat provinsi untuk mendokumentasikan praktik terbaik guru dalam mengintegrasikan teknologi. Inisiatif ini dapat memperkaya sumber pengetahuan organisasi dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data (Fullan, 2021; Ministry of Education and Culture, 2024).

Akhirnya, penelitian ini memberikan implikasi sosial bahwa peningkatan profesionalisme guru tidak hanya meningkatkan mutu pembelajaran, tetapi juga memperkuat citra sosial profesi guru di mata masyarakat. Melalui peran aktif PGRI dalam membangun budaya reflektif, kolaboratif, dan inovatif, guru Indonesia dapat menjadi garda depan transformasi pendidikan abad ke-21. Oleh karena itu, kesinambungan antara kebijakan pemerintah, dukungan organisasi profesi, dan kemauan guru untuk terus belajar menjadi fondasi utama untuk mewujudkan sistem pendidikan yang tangguh, adaptif, dan humanistik di era digital.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru di era transformasi pendidikan digital. PGRI tidak hanya berfungsi sebagai wadah organisasi profesi, tetapi juga sebagai fasilitator utama dalam pengembangan kompetensi pedagogik dan keterampilan digital guru melalui program pelatihan berkelanjutan, mentoring, serta pembentukan komunitas belajar profesional. PGRI juga berperan aktif dalam mendampingi guru dalam pengembangan media dan bahan ajar digital, serta memastikan guru memiliki pemahaman yang memadai mengenai pemanfaatan teknologi pendidikan secara efektif dan etis. Peran ini menunjukkan bahwa PGRI tidak sekadar berorientasi pada peningkatan kemampuan teknis guru, tetapi juga pada pembentukan karakter profesional yang inovatif, reflektif, dan berkomitmen terhadap mutu pendidikan nasional.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan peran PGRI sangat dipengaruhi oleh kekuatan advokasi dan kepemimpinannya dalam memperjuangkan hak, kesejahteraan, dan posisi profesional guru di tengah perubahan sistem pendidikan digital. Melalui kegiatan advokasi, forum kebijakan, dan kemitraan dengan pemerintah, PGRI menjadi jembatan strategis antara kebutuhan guru dan arah kebijakan pendidikan nasional. Sinergi antara PGRI, lembaga pendidikan, dan pemangku kebijakan memungkinkan lahirnya program-program peningkatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan guru di berbagai daerah, termasuk daerah 3T. Namun demikian, tantangan seperti variasi tingkat partisipasi anggota, disparitas infrastruktur digital, serta keterbatasan sumber daya organisasi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah, desentralisasi pelatihan, dan penguatan kolaborasi lintas sektor agar peran PGRI dapat lebih optimal dalam menjangkau seluruh lapisan guru di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa PGRI merupakan aktor kunci dalam mendorong transformasi pendidikan digital di Indonesia. Melalui pendekatan yang komprehensif—meliputi pelatihan, advokasi, refleksi, kepemimpinan transformasional, dan kolaborasi berbasis teknologi—PGRI berhasil membentuk ekosistem profesionalisme guru yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ke depan,

PGRI diharapkan terus memperkuat sistem manajemen berbasis data, memperluas jangkauan pelatihan digital, serta memfasilitasi pertukaran praktik terbaik antarwilayah sebagai upaya membangun komunitas guru yang berdaya saing global. Dengan demikian, PGRI tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia, tetapi juga menjadi model organisasi profesi yang progresif dan berdaya transformatif dalam menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21.

DAFTAR PUSTAKA

- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2020). *Effective teacher professional development*. Learning Policy Institute.
- Etzkowitz, H., & Zhou, C. (2018). *The triple helix: University–industry–government innovation and entrepreneurship*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429492519>
- Fullan, M. (2021). *The right drivers for whole system success*. Centre for Strategic Education.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2020). *Professional capital: Transforming teaching in every school*. Teachers College Press.
- Himmatul Haq Aidi, & Zainal Abidin. (2023). Peran organisasi PGRI dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2).
- Kemendikbudristek. (2025). *Transformasi digital dalam pendidikan nasional: Laporan tahunan 2025*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Ministry of Education and Culture. (2024). *Digital competence framework for Indonesian teachers*. Ministry of Education and Culture.
- Novianto, H., Nurkhasanah, N., & Nurkolis, N. (2025). The role of professional organization (PGRI) in protecting teachers' rights. *Journal of Education Development*, 54(1), 220–226.
- Nurdihayati, R., & Thaufani, A. (2025). Mendorong literasi digital guru melalui manajemen pendidikan: Tinjauan literatur. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3).
- Nuraini, & Nurkolis. (2025). The role of the teacher professional organization (PGRI) in protecting teacher profession disputes. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 10(1), 181–194.* <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.12979>
- OECD. (2022). *Teachers as learners: Supporting continuous professional learning*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1e6f0a44-en>
- Pembelajaran, M. M. (2025). Upaya pengembangan profesionalisme guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. *Jurnal Pembelajaran Modern*, 10(1).
- Protecting, I., & Profession, T. (2025). The role of the teacher professional organization (PGRI) in protecting teacher profession disputes. *Journal of Educational Policy*, 10(1), 25–33.
- Rahmawati, D., Hidayat, M., & Suryana, A. (2024). Digital literacy competence of teachers in Indonesian schools: Challenges and opportunities. *Indonesian Journal of Digital Education*, 5(2), 77–92.
- Redecker, C. (2020). *European framework for the digital competence of educators (DigCompEdu)*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/159770>
- Schön, D. A. (1987). *Educating the reflective practitioner*. Jossey-Bass.
- Trust, T., Krutka, D. G., & Carpenter, J. P. (2016). “Together we are better”: Professional learning networks for teachers. *Computers & Education*, 102, 15–34. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.06.007>
- UNESCO. (2023). *Reimagining teacher professional development in the digital age*. UNESCO Publishing.